

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini memuat hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis adalah penelitian baru dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jurnal-jurnal yang dipilih untuk dijadikan kajian pustaka adalah yang berhubungan dengan Kota Inklusi yang memberikan kesetaraan dan tempat tinggal yang layak huni bagi semua.

Ogwueleka & Diala (2018) membahas tentang Nigeria, kehidupan di Negara Nigeria masih dalam kondisi yang belum layak huni. Masih banyak permasalahan yang terjadi disana seperti ekologi, sosial-ekonomi dan budaya di Nigeria. Pembangunan yang tinggi pada kegiatan industri tidak didukung oleh keadaan lingkungan yang mendukung menjadikan lingkungan yang ada malah membawa permasalahan. Ekonomi bisa dibilang sebagai penggerak tetapi mayoritas warga Nigeria adalah penduduk miskin kebanyakan dari mereka hidup di daerah kumuh dalam kehidupan yang terbatas. Memulai perubahan di Nigeria tidak harus dengan membuat infrastruktur baru tetapi dengan memanfaatkan yang ada dan mencoba metode baru tanpa mengabaikan yang sebelumnya.

Donaghy (2017), menggambarkan keadaan Kota Inklusi di Sao Paulo. Adanya kesenjangan yang terjadi sana dan menyebabkan permasalahan atas perumahan bagi masyarakat miskin. Organisasi dan masyarakat harus berkerja keras

untuk menghentikan pengusuran perumahan. Keduanya harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga apa yang diputuskan pemerintah bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Membawa masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak semudah mengajak organisasi untuk diberdayakan. Mewujudkan perumahan untuk masyarakat miskin perlu banyak dukungan dari masyarakat itu sendiri, pada dasarnya yang dilakukan oleh organisasi untuk membawa masyarakat terlibat adalah untuk melindungi hak masyarakat itu sendiri, hak memiliki tempat tinggal.

Puspitawati (2016), pemerintah daerah mengembangkan Yogyakarta ke arah *Smart City* tetapi tetap menjaga kebudayaan yang sudah sangat melekat pada Yogyakarta. Keinginan untuk berubah mejadi lebih baik untuk warga Yogya dan masyarakat pendatang sangat dibutuhkan demi Yogyakarta yang nyaman untuk semua. Perubahan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, peran dan partisipasi warga Yogya juga sangat dibutuhkan untuk kesetaraan masyarakat disegala bidang.

Cowley, et al (2018), publikasi penggunaan layanan, publisitas kewirausahaan, publisitas politik, dan publisitas sipil merupakan empat modalitas publisitas yang diterapkan di enam kota di Inggris (Bristol, Glasgow, London, Manchester, Milton Keynes dan Peterborough). Modalitas pengguna layanan berhubungan dengan konsumsi sehari-hari layanan perkotaan contohnya air, transportasi infrastruktur maupun ketersediaan listrik, peluang ekonomi memanfaatkan teknologi digital untuk perkembangan ekonomi, publisitas politik

melibatkan publik dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan melalui aplikasi dan platform secara online, dan untuk membedakan publisitas politik dan publisitas sipil dikatakan dalam jurnal ini masih sulit untuk dibedakan. Publisitas publik yang diharapkan adalah berusaha untuk berhubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya, interaksi yang terjalin akan membawa pada pembangunan kota. Untuk *Smart Nation Singapore*, harapannya adalah orang-orang itu diberdayakan oleh teknologi untuk mejalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan... . Negara Cerdas adalah dibangun bukan oleh pemerintah, tetapi oleh kita semua (Smart National, 2016). Pemerintah berusaha mejalankan *Smart City*, tetapi tetap membutuhkan masyarakat untuk keberhasilan dari pelaksanaannya. Tiap Kota di Inggris memiliki tujuan pengembangan yang berbeda dengan penggunaan *Smart City* nya karena memberikan efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Kim (2014), penulis mengambil garis besar mengenai Songdo (Korea), Yujiapu dan Lingang (Cina) berlokasi sangat strategis untuk pembangunan kota kearah perekonomian. Ketiga kota tersebut terletak dipinggir laut. Penataan kota yang sesuai dengan letak kota memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ketiga kota. Pembangunan kota pinggir laut menambahkan reklamasi sebagai salah satunya. Melakukan pengembangan infrastruktur di tanah reklamasi merupakan peluang yang bagus. Kota masa depan yang dibangun harus mengatasi hal yang tidak manusiawi yang terjadi dilingkungan. Pengembangan kota kearah kota hijau juga dilakukan. Kota dipinggir laut juga bisa mengarahkan pinggir kota dekat laut untuk dijadikan café-café kemudian tengah kota bisa dijadikan pusat perkantoran. Pembangunan kota yang sangat menarik juga

bisa mendatangkan wisatawan dan menambah perekonomian. Kota yang berbatasan dengan laut juga sangat menguntungkan, bisa menjadikannya pusat perdagangan seperti negara Singapura. Negara kecil tetapi pelabuhan mereka adalah pusat perdagangan dari berbagai negara. Kota-kota dengan pelabuhannya bisa memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan kemampuan yang kuat dan usaha mengembangkannya secara berkelanjutan bisa memberikan pembangunan nasional dan keuntungan perekonomian.

Bunyan (2016) dan Jackson, et al, (2016) Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama, diantara mereka ada yang memiliki pemikiran yang sederhana maupun berbelit-belit. Ada yang bisa terbuka dengan budaya baru ada yang menolak budaya baru. Perkembangan selalu saja terjadi dan manusia dituntut untuk mengolah, mempertahankan, mengabungkan, atau pun menolak berbagai hal yang pasti terjadi tetapi jika tidak bisa mengikuti perkembangan maka akan tersingkir. Dalam jurnal ini mengajak manusia untuk mencoba hidup dengan orang para pendatang dan mencoba memecahkan masalah bersama. Mencoba membuat sebuah kota yang layak untuk ditinggali untuk semua karena tidak mungkin semua hal yang datang untuk membuat perubahan ditolak, akan dilakukan pemilihan yang mana yang cocok untuk diterapkan dan yang mana tidak harus digunakan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan yang terbaik. Pemerintah sebagai perencana dan masyarakat dibutuhkan untuk melakukan partisipasi dalam berbagai bentuk dalam banyak hal yang terkait mengembangkan sebuah kota yang layak huni untuk semua.

Neto and Kofuji (2016), penulis dalam jurnalnya menggambarkan permasalahan yang banyak dihadapi disabilitas di perkotaan. Ada beberapa akses yang tidak mendukung disabilitas dan itu membuat kesulitan tersendiri bagi mereka. Neto & Kofuji mengartikan Inklusif *Smart City* dengan “Untuk dianggap "pintar", sebuah kota harus memperkuat partisipasi semua orang mengakui keragaman warga, perjuangan melawan segregasi minoritas, dan coba, sebisa mungkin, untuk menghilangkan, tidak hanya fisik tetapi juga digital, hambatan.” Kota Inklusif harus membantu orang dengan disabilitas bergerak dengan bebas, aman dan bisa menjelajahi seluruh kota. tujuan utama penulis mengamati ruang perkotaan untuk disabilitas, alat teknologi yang membantu disabilitas dan merumuskan kota cerdas inklusif.

Infrastruktur digital modern, peyampaian layanan harus berpusat pada warga negara, infrastruktur fisik cerdas, keterbukaan untuk belajar dari orang lain dan transparansi hasil/kinerja merupakan elemen yang ada di kota cerdas menurut mereka. Sebelum adanya kota cerdas inklusif pemerintah hanya memberikan akses kepada orang-orang tanpa kelainan, sekarang dengan banyaknya tuntutan pemerintah memberikan akses untuk semua. Menurut *United Nations* dalam jurnal ini “memungkinkan penyandang cacat untuk hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan yang tepat. Langkah-langkah untuk memastikan akses penyandang cacat, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, kepada lingkungan fisik, transportasi, hingga informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, dan lainnya fasilitas dan layanan terbuka atau diberikan kepada publik,

baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.” Penyandang disabilitas harus diberikan untuk bangunan, jalan, tempat umum, transportasi, didalam ruangan maupun diluar ruangan. Menjadikan inisiatif perkotaan sebagai kota cerdas yang inklusif.

Charbonneau (2016). Bank Dunia berusaha menyediakan tempat tinggal yang layak untuk semua, terutama bagi warga yang tinggal di daerah kumuh. Kebanyakan dari warga tersebut bertempat tinggal di tanah yang illegal sehingga bisa saja mereka diusir sewaktu-waktu. Bank Dunia juga memaksa negara-negara peminjam dana untuk melakukan program ini. Kedala pemerintah juga bagaimana caranya menyediakan lahan yang cukup besar untuk di pergunakan membangun rumah bagi warga serta hal-hal pendukung lainnya seperti lapangan pekerjaan dan fasilitas umum lainnya. Relokasi semestinya memang harus dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang bisa saja terjadi.

Warga yang akan direlokasi pasti akan menolak secara tegas. Mereka takut relokasi malah akan membuat kehidupan mereka bukan lebih baik tapi malah akan menadi lebih buruk. Mereka mencari pekerjaan dekat dengan tempat tinggal, jika nanti terdapat relokasi maka mata pencarian mereka bisa terletak sangat jauh sehingga tidak sebanding pendapatan dan pengeluaran dan atau mungkin mereka malah menjadi pengangguran ketika sudah direlokasi. Pemerintah pasti telah memikirkan apa yang ditakuti oleh warga kemudian juga telah mencari solusi, tetapi solusi yang diberikan belum tentu bisa membuatnya menjadi lebih baik menurut warga. Pembangunan tempat tinggal juga tidak lepas dari orang-orang yang berkepentingan dibelakangnya. Banyak kelompok yang membantu tetapi juga

banyak kepentingan individu dibelakang itu semua. Warga Kawasan kumuh adalah masyarakat kecil yang suaranya tidak terlalu berpengaruh dibandingkan kelompok besar yang memiliki kepentingan sehingga jarang dapat menuntut pemerintah yang berkuasa.

Ibrahim (2017). Tanah menjadi pengukur kekayaan seseorang. Tanah bisa digunakan untuk lahan pertanian dan mendirikan bangunan. Kebanyakan orang membutuhkan lahan untuk menunjang perekonomian. Lahan menjadi persoalan yang kompleks karena memiliki tingkat ekonomi atau prospek ke depan yang tinggi dan semua orang membutuhkan lahan untuk dijadiann rumah, tempat usaha, perkantoran perumahan, lahan pertanian, properti. Pemilik bangunan tidak segan-segan menghancurkan bangunanya sendiri jika diyakini bangunan baru yang akan dibangun lebih menguntungkan dari pada bangunan sebelumnya, pebisnis memainkan untung rugi dalam setiap pengambilan keputusan karena perekonomian menjadi faktor penting dalam perkembangan sekarang ini.

Properti yang ada sekarang ini juga akan berubah fungsi seiring tuntutan dari perkembangan. Penduduk meningkat setiap tahunnya, lahan yang tadinya berupa lahan pertanian bisa menjadi area perumahan atau bisa menjadi area perkantoran jika pada daerah itu merupakan tempat yang strategis untuk membuka perusahaan dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan mendatangkan tenaga kerja dari darah lain dan meningkatkan perekonomian. Lahan yang ada secara terus-menerus dikembangkan, apa lagi didaerah perkotaan hampir tidak ada tanah kosong yang tersisa padahal lahan masih sangat dibutuhkan karena permintaan dari kalangan tertentu untuk pembangunan berkelanjutan. Solusi yang

dikeluarkan akhirnya adalah reklamasi lahan untuk mencukupi kebutuhan lahan yang dibutuhkan. Tidak semua lahan bisa dipergunakan untuk pembangunan ada beberapa hal yang perlu di kesampingkan contohnya adalah Kebijakan dan Batasan Pemerintah, Lembaga Keagamaan maksudnya adalah tempat-tempat yang menjadi tepat suci agama yang ada.

Moser (2013) dan Mackness (2013) sama-sama membicarakan wanita. wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk menggunakan ruang publik serta meningkatkan keselamatan dan keterlibatan wanita di kota. Pemerintah memiliki tanggungjawab dan bukan malah menyalahkan wanita dalam peristiwa yang terjadi. Wanita rentan dengan kejahatan yang terjadi, pemerintah harus memberikan mobilitas dan akses khusus untuk wanita agar terhindar dari tindakan kejahatan dan akses untuk wanita juga termasuk dalam hak yang harusnya diberikan pada wanita. Wanita dan pria juga harusnya memiliki hak yang sama dalam hal lapangan pekerjaan, seharusnya tidak ada perbedaan gender yang menjadi persoalan. Wanita juga harus ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan pada sebuah kota untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi.

Berdasarkan jurnal-jurnal yang menjadi kajian pustaka cakupan Kota Inklusif sangat luas. Ada 10 jurnal yang menjadi kajian pustaka dan semuanya memiliki gambaran Kota Inklusifnya masing-masing. Jurnal pertama mengenai air bersih dan sanitasi, kemudian lembaga partisipasi, dan seterusnya membahas tentang mewujudkan pada Kota Budaya, mobilitas, perekonomian dari letak wilayah, kota layak huni tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga pendatang,

Kota Inklusi untuk disabilitas, tempat tinggal yang layak, meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan lahan, dan terakhir membahas tentang wanita.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mencoba membahas Kota Inklusif melihat dari sisi Kota Yogyakarta yang menjadi Kota Budaya dan Kota Pendidikan. Pada penelitian sebelumnya di Indonesia mengenai Kota Inklusif lebih banyak membahas penyandang disabilitas. Padahal pembahasan mengenai Kota Inklusif tidak hanya tentang penyandang disabilitas. Penulis ingin meneliti Kota Inklusif di Kota Yogyakarta secara keseluruhan gender tidak hanya pada satu gender agar di ketahui bagaimana pelaksanaan Kota Inklusif secara luas dan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan Kota Inklusif yang mencakup semua golongan dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Peran Pemerintah

Peran adalah sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat (Usman, 2012)

Menurut Narwoko (2013: 160) Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Mewujudkan Kota Inklusif membutuhkan pemerintah untuk menjalankan dan sebagai pelaksana dalam pemerintahan. Atas dasar itu peran pemerintah sangat penting. Ada tiga peran pemerintah yang disebutkan oleh (Andini, 2013), yaitu kebijakan publik, pemberdayaan, dan pelayanan.

1. Regulator (Kebijakan Publik)

Pemerintah melalui kebijakan publik merupakan bidang yang menentukan arah umum yang harus ditepuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, adapun juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi pemerintah. Disini peran pemerintah sebagai Lembaga yang berhak membuat dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang baik maka akan membawa akibat baik, sedangkan kebijakan yang buruk maka akan berakibat sebaliknya. Oleh karena itu peran pemerintah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan melalui penerbitan peraturan-pertauran. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Dinamisator (Pemberdayaan)

Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Fasilitator (Pelayanan)

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalannya kepada masyarakat yang diberdayakan.

2.2.2 *Smart City*

1. Pengertian *Smart City*

Menurut Situmorang (2017) *Smart city* merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. *Smart City* merupakan sebuah impian dari hampir semua negara di dunia. Dengan *Smart City*, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut

kota, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget.

Smart City adalah untuk dapat membentuk dan menerapkan suatu kota yang aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial dan teknologi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari strategi implementasi *Smart City* adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing), teknologi dan lingkungan (kenyamanan) atau lebih umum lagi berdasarkan *United Nation*, dapat dikatakan bahwa tujuan *Smart City* adalah untuk membentuk kota yang *Sustainable* (ekonomi, sosial, lingkungan). Secara umum pelaksanaan konsep *smart city* ini juga sudah mulai berjalan dengan dukungan aplikasi yang terus berkembang sehingga tercipta lingkungan yang kreatif di bidang teknologi, sebagai langkah awal yang baik menuju kota pintar (Puspitawati, 2016).

Kota pintar bukanlah hal baru atau unik. Meskipun kota pintar tidak keluar untuk menjadi perwujudan yang tepat dari setiap imajiner perkotaan tunggal tetapi halus dan memperbarui kolektif dari beberapa retorika yang membuatnya lebih pas, menjanjikan, dan menarik (Wang, 2017).

Smart City tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Konsep ini merupakan kombinasi antara teknologi baru dengan pola pikir cerdas tentang pengguna teknologi dalam sebuah organisasi. Sebuah perencanaan kota dengan menggunakan konsep *smart city* memiliki suatu prakarsa, berupa bayangan bahwa teknologi dapat menciptakan pengalaman baru bagi pengguna. Prakarsa tersebut juga mengajak kita untuk berpikir bahwa konsep *smart city* merupakan sebuah *holistic system* dan

terkait dengan pengguna sebuah sistem baru yang dapat merubah perilaku pengguna menjadi lebih positif (Supangkat, dkk, 2015).

Manvrine & Cochrane dalam Supangkat, dkk (2015) menyebutkan bahwa *smart city* merupakan konsep pengelola kota melalui penggabungan berbagai teknologi untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan memerikan masyarakat dengan hidup yang lebih layak.

Noviant dan Syahid (2017), Program *Smart City* ini diadopsi dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui inovasi teknologi. Pembangunan kota menjadi lebih nyaman, layak huni, aman, dan inklusif.

Konsep *smart city* dalam perencanaan kota adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi (Tim PSPPR UGM, 2016).

2. Indikator Kota Pintar

Pada Kota Pintar terdapat 6 indikator utama yang dijadikan patokan untuk mewujudkan *Smart City*, yaitu *Smart Living*, *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Envirotment*, dan *Smart People*.

Pengertian 6 indikator utama *smart city* menurut Muliarto (2015):

- 1) *Smart Living* atau hidup yang cerdas : yaitu mengacu pada kualitas hidup dan kebudayaan masyarakat faktor yang paling mempengaruhi adalah

tersedianya kebutuhan-kebutuhan, adanya keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan hidup.

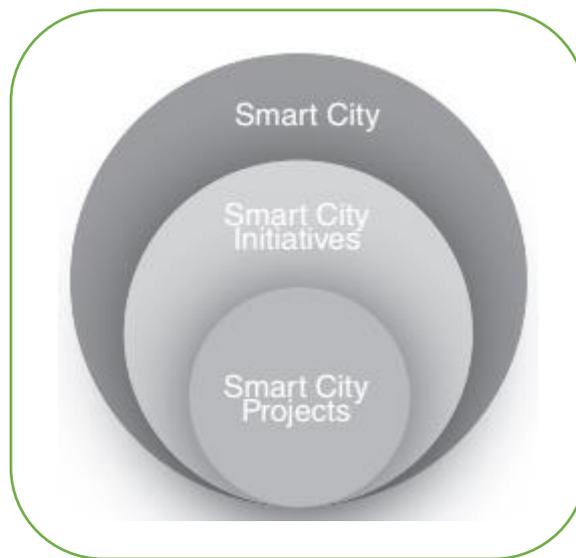
- 2) *Smart Governance* atau tata kelola pemerintahan yang cerdas : paradigma pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi kebijakan.
- 3) *Smart Economy* atau Ekonomi cerdas : yaitu tingginya tingkat perekonomian dan kesejahteraan finansial masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pendapatan perkapita yang tinggi.
- 4) *Smart Mobility* atau Mobilitas cerdas : yaitu sistem pergerakan yang memungkinkan terjadinya pemenuhan kebutuhan dengan pergerakan seminim mungkin dan secepat mungkin.
- 5) *Smart Environment* atau Lingkungan cerdas : yaitu lingkungan yang memberikan kenyamanan dimasa kini dan masa mendatang dengan kata lain keberlanjutan lingkungan baik keadaan fisik maupun non fisik..
- 6) *Smart People* atau Masyarakat cerdas : yaitu modal manusia yang *well educated* baik secara formal maupun non formal dan terwujud dalam individu atau komunitas-komunitas yang kreatif.

Tabel 2.1
Aksi Proyek Kota Pintar

Pemerintahan Cerdas	Partisipasi	Lingkungn Cerdas	Jaringan dan pemantauan lingkungan	
	Transparansi dan aksesibilitas informasi		Efisiensi energi	
	Publik dan pelayanan sosial		Perencanaan kota dan perbaikan kota	
	Pemerintahan multilevel		Bangunan pintar dan renovasi bangunan	
Ekonomi Cerdas	Inovasi		Sumber daya manajemen	
	Kewiraswastaan		Perlindungan lingkungan	
	Local dan keterkaitan global	Masarakat Cerdas	Pendidikan digital	
	Produktifitas		Kreatifitas	
	Fleksibilitas pasar tenaga kerja		TIK – Memungkinkan Pekerjaan	
	Manajemen lalu lintas		membangun masyarakat dan manajemen kehidupan	
Mobilitas Cerdas	Transportasi umum	Masyarakat Inklusif		
	TIK infratraktur	Hidup Cerdas	Kepariwisataan	
	Logistik		Budaya dan Liburan	
	Aksesibilitas		kesehatan	
	Opsi bersih tidak bermotor		keamanan	
	Multimodality			Aksesibilitas teknologi
				Kesejahteraan dan inklusif sosial
				Manajemen ruang publik

(Sumber: Monzon, 2014)

Tabel di atas merupakan gambaran tentang apa saja yang bisa dikembangkan untuk membangun kota pintar sebagaimana yang diimpikan.



Gambar 2.1

Smart City Framework

Sumber : (Claudel, et al., 2015)

Melalui *Smart City* kemudian Kota Inklusif itu muncul karena pemerintah berinisiatif untuk membuat sebuah kota yang layak huni bagi semua warga. Setiap kota memiliki tujuan kedepannya masing-masing tergantung faktor-faktor yang melatar belakangnya, jadi tidak semua memiliki indikator yang sama untuk mewujudkan Kota Inklusif mereka tetapi ada cakupan indikator utama yang menjadi patokan untuk mewujudkan Kota Inklusif bagi semua.

2.2.3 Kota Inklusif

1. Pengertian Kota Inklusif

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi landasan Kota Inklusif. Pengembangan Kota Inklusif semakin gencar dilakukan dengan mengadakan Habitat III diberbagai kota didunia termasuk Indonesia. Habitat III merupakan

pertemuan yang membicarakan tentang Kota Inklusif dengan *New Urban Agenda* yang menjadi tujuan akhir (Kaika, 2017).

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang inklusif. Kota yang masukan antara fungsional, sosial, dan generasional. Kota yang memfasilitasi pada kualitas hunian yang sekaligus menjamin keamanan semua penghuninya, yang miskin maupun yang eksklusif. Kota yang berkeadilan dalam pendistribusian layanan, efisien dalam manajemen dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi berkelanjutan dan bersetiakawan. Kota yang memfasilitasi integrasi dan identifikasi setiap penduduk dengan kotanya. Kota inklusi adalah kota ramah lingkungan yang dapat diakses oleh seluruh penduduknya tanpa terkecuali. inklusi bisa diartikan sebagai keterbukan. Dalam hubungannya dengan lingkungan, inklusi berarti keterbukaan setiap orang untuk mendiami suatu wilayah tertentu tanpa memandang latar belakang dan perbedaan sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman. (<https://koranyogya.com/habitat-iii-daya-makna-dan-visi-kota-berkelanjutan-bagi-indonesia/>. Diakses 27 Agustus)

Kota inklusif adalah kota yang menghargai semua orang dan kebutuhannya secara setara. Ini adalah salah satu di mana semua penduduk — termasuk yang paling terpinggirkan dari pekerja miskin — memiliki suara perwakilan dalam proses pemerintahan, perencanaan, dan penganggaran, dan memiliki akses ke mata pencaharian yang berkelanjutan, perumahan legal dan layanan dasar yang terjangkau seperti air / sanitasi dan menyediakan listrik (Commentary, 2013).

Kota inklusif adalah tempat di mana semua orang, terlepas dari cara ekonomi, jenis kelamin, etnis, kecacatan, usia atau agama, diaktifkan dan

diberdayakan untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam sosial, ekonomi, peluang budaya dan politik yang ditawarkan kota-kota. Lingkungan inklusif mempertimbangkan keragaman orang dan menghancurkan penghalang dan pengecualian yang tidak perlu dengan cara itu manfaat semua. (World Enabled, 2016).

Dalam studi yang dilakukan oleh Onaiwu (2016) dalam Ogwueleka & Diala (2018), itu menetapkan bahwa terdapat hubungan antara ekonomi, karakteristik sosial, dan lingkungan, dan ini menunjukkan keberlanjutan.

Menurut Ling et.al (2016) dalam Ogwueleka & Diala (2018) komponen daya hidup seperti yang terlihat di Kota Vancouver, yang dianggap sebagai kota paling layak huni di dunia adalah

- 1) perlindungan lingkungan;
- 2) pemeliharaan ekonomi yang beragam;
- 3) penyediaan aksesibilitas melalui penggunaan lahan;
- 4) pengiriman layanan untuk penduduk dan bisnis;
- 5) Pilihan perumahan;
- 6) Anggaran kota seimbang; dan,
- 7) Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengiriman.

Menurut *Victoria Transport Policy Institute* (2017) dalam Ogwueleka & Diala (2018) belajar tentang livability menggunakan survei komunitas dan keterlibatan publik teknik untuk mengembangkan tujuan masalah *livability* perkotaan sebagaimana ditentukan di bawah:

- 1) Persepsi keamanan publik.
- 2) Jalan-jalan yang menarik dan fasilitas umum lainnya.
- 3) Karakter komunitas: Komunitas yang layak huni cenderung memiliki nilai identitas unik yang membuatnya istimewa dan menanamkan rasa kebanggaan masyarakat.
- 4) Keramahan dan pertimbangan: Interaksi pribadi yang positif antara orang-orang (termasuk penduduk, karyawan, dan pengunjung) berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat.
- 5) Komunitas kohesi: Ini mengacu pada tingkat jejaring sosial dalam sebuah komunitas, termasuk sejauh mana warga bekerja sama dan berinteraksi.
- 6) *Walkability*: Berjalan adalah cara utama orang melakukan perjalanan, berinteraksi dan mengalami komunitas mereka.
- 7) Kenyamanan, Aksesibilitas dan Pilihan Transportasi, yang meningkatkan peluang orang untuk bekerja, berbelanja, dan rekreasi, dan mendukung tujuan kesetaraan.
- 8) Tenang, udara segar dan kebersihan.
- 9) Kualitas mobilitas independen untuk anak-anak, orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.
- 10) Rekreasi: Peluang untuk bersenang-senang, olahraga, dan informal interaksi komunitas.
- 11) Keterjangkauan memungkinkan orang dari semua kelas pendapatan untuk menjadi bagian dari masyarakat, dan mengurangi stres dan ketidakpastian penduduk.

12) *Equity: Respect*, keadilan dan pertimbangan orang-orang dengan special kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat.

Menurut Townsend (Mehta & Yadav, 2016), Agar sebuah kota menjadi inklusif, aspek-aspek seperti keterlibatan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, kesetaraan pengobatan beragam orang, akses untuk layanan dan peluang baru, dan peluang untuk keterlibatan dan mobilisasi itu mencerminkan keragaman kota dan bangsa adalah landasan. Untuk membuat kota menjadi cerdas dan inklusif, penting untuk melibatkan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lain dalam desain, pengembangan, dan implementasi.

Berdasarkan jurnal dan teori-teori yang membahas Kota Inklusif secara garis besar dikelompokkan menjadi beberapa dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Dimensi dan Indikator

Dimensi	Indikator
Perubahan Sosial	Mobilitas, layanan publik, kelompok terpinggirkan, hubungan kekuasaan sosial, keterlibatan
Pertumbuhan Ekonomi	Peran ekonomi, tertanam dalam legitimasi, hierarki sosial statis, segmentasi sosial, tendensi di pasar, kategori kelas sosial
Lingkungan Hidup	Skema perumahan, sanitasi, air minum, kontrol politik dan birokrasi, dan instrumen perencanaan
Hukum, Peraturan, dan Pemerintahan	Peran dan posisi pusat, pemerintah daerah, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan
Gender	Fragmentasi sosial, kepemimpinan perempuan, sarana pelaksanaan

Sumber: data olahan penulis 2018

Pada pembahasan gender bukan hanya membahas mengenai laki-laki dan perempuan, tetapi untuk mendapatkan kesetaraan dalam Kota Inklusif maka kelompok gender berkembang menjadi Afirmatif Gender. Afirmatif Gender adalah

mengikutsertakan anak-anak, disabilitas, lansia, masyarakat miskin dan wanita dalam kategori gender Kota Inklusif.

Berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dibaca ada beberapa teori yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan yang menjadi Kota Inklusif. Kota inklusi adalah mereka yang memastikan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan, kesetaraan dalam distribusi layanan, dan akses ke kualitas hidup yang bermartabat. Tapi yang jelas, kota sangat bervariasi sejauh mana mereka memberikan inklusi ekonomi, politik dan sosial (Donaghy, 2017). Mengembangkan teknologi publik untuk membentuk kembali publik dengan cara baru (Cowley, Joss, & Dayot, 2018). Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan tata letak kota dan mendesain kota sedemikian rupa (Kim, 2014). Orang yang tinggal di kota dapat menjadi manusia yang lebih kompleks jika mereka belajar hidup bersama orang asing, menjumpai keanekaragaman, memasuki pengalaman dan minat hidup yang tidak dikenal (Bunyan, 2016).

2. Kota Inklusif di Indonesia

8 (delapan) dari 99 Pemerintah Kota di seluruh Indonesia, sudah menyatakan siap menjadi Kota Inklusi di tahun 2020. Kota Inklusi artinya kota tanpa diskriminasi. Tidak main-main, indikator yang digunakan pun mengacu pada indikator assessment UNESCO (Aksi Menuju Yogyakarta Kota Inklusi 2018).

Ide “kota inklusif” tampaknya muncul sebagai pengembangan kebijakan di kota-kota yang sebelumnya telah menjalankan program pendidikan inklusif. Dalam

konteks ini, beberapa kota telah mencangkan diri sebagai “kota inklusif” atau kota yang siap menjadi “kota inklusif”. Kota Surakarta, barangkali yang pertama di Indonesia, mencangkan diri sebagai “Kota Inklusi” pada tahun 2013 (‘Hadi Rudyatmo Mencangkan “Solo Kota Inklusi”’, 2013). Setelah itu, beberapa kota lain menyusul menjadi kota inklusi, seperti Kota Yogyakarta (2015), Kota Padang, Brebes, dan Jember (2016) (Maftuhin, 2017).

Meskipun deklarasi “kota inklusi” sudah bermunculan di berbagai wilayah Indonesia, namun konsep dan kajian akademik tentang kota inklusif masih belum disentuh secara mendalam. Kota-kota yang disebut sebagai kota inklusif belum memiliki konsep yang mapan tentang inklusivitas mereka. “Kota inklusi” di Surakarta, misalnya, lebih terkait dengan pendidikan inklusif daripada “kota inklusif”. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para pemangku kepentingan di kota itu yang mengukur kesiapan kota inklusif dari jumlah sekolah yang siap menjadi sekolah inklusi (‘Sosialisasi Pendidikan Inklusif Menuju Solo Kota Inklusi’, n.d.). Jadi, mungkin yang dimaksud bukan “kota inklusi” tetapi “kota pendidikan inklusi” (Maftuhin 2017). Tujuan dari Kota Inklusi tiap Pemerintah Kota yang menyatakan siap untuk menjadi Kota Inklusi berbeda-beda. Semua itu tergantung bagaimana tujuan dari Pemerintah Kota.

3. Indikator Kota Inklusif di Indonesia

Menurut UNESCO ada beberapa indikator yang harus di penuhi jika sebuah kota ingin menjadi Kota Inklusif:

1. Data;

2. Pengembangan masyarakat / partisipasi politik;
3. Perumahan;
4. Kesehatan;
5. Perlindungan & pelayanan sosial;
6. Pendidikan;
7. Olahraga, seni & rekreasi;
8. Tenaga kerja
9. Akses terhadap keadilan dan perlindungan
10. Pengurangan risiko bencana
11. Transportasi umum

Indikator yang diberikan oleh UNESCO untuk Indonesia merupakan indikator umum yang harus terpenuhi untuk mewujudkan Kota Inklusif. Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mewujudkan Kota Inklusif bisa menambahkan indikator lain yang bisa menunjang terlaksana Kota Inklusif di masing-masing kota, karena setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

2.2.4 *Social Network Analysis (SNA)/Analisis Jejaring Sosial*

1. Pengertian *Social Network Analysis (SNA)*

Tsvetovat & Kouznetsv (Oktora & Alamsyah, 2014) mengemukakan bahwa SNA dapat dideskripsikan sebagai studi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan memanfaatkan teori graf. Menurut Wiki Book (2011) Analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial dalam hal teori jaringan yang terdiri dari simpul dan ikatan (juga disebut tepi, tautan, atau koneksi). Analisis Jejaring

Sosial adalah suatu teknik untuk mempelajari hubungan/relasi sosial antar anggota dari sebuah kelompok orang (Hanneman, A.R., Riddle (Insani & Waryanto, 2012).

Bertini (Indriasari & Sidhi, 2011) *Social network* dapat direpresentasikan dengan melakukan visualisasi terhadap suatu jaringan. Hubungan antar aktor dapat dengan jelas terlihat dan dapat dieksplorasi lebih jauh. Tujuan visualisasi adalah mencoba menampilkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan seseorang yang menggunakannya. Beberapa metode visualisasi jaringan adalah: 1) *node link* diagram, aktor-aktor direpresentasikan dalam node, dan koneksi antar mereka dalam bentuk garis; 2) matriks, kolom dan baris merepresentasikan individu dan *cell entries* merepresentasikan koneksi. Penelitian di sejumlah bidang akademik telah menunjukkan bahwa jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, dari keluarga sampai ke tingkat negara dan memainkan peran penting dalam menentukan cara masalah ini diselesaikan, organisasi berjalan, dan sejauh mana individu berhasil mencapai tujuan mereka (Insani & Waryanto, 2012).

2. Metode dasar untuk analisis jaringan

Menurut Knoke & Yang (2008) ada beberapa yang menjadi dasar dalam metode analisis jaringan sosial, antaranya:

1) Grafik

Grafik memperlihatkan visualisasi dari jaringan sosial, dimana matrik menggunakan aljabar matematika dari hubungan jaringan.

2) Matrik

perwakilan aljabar hubungan jaringan dapat mengekspresikan semua informasi kuantitatif yang tertanam dalam sosiogram, sementara memungkinkan serangkaian analisis yang jauh lebih besar mungkin dengan representasi visual yang sesuai.

3) Ukuran Hubungan

Mengukur hubungan data jaringan melalui dua atau lebih dimensi yang ingin didiskusikan

4) Sentralitas dan Prestise

Teori grafik penggunaan primer dalam analisis jejaring sosial adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor penting atau terkemuka pada tingkat analisis individu dan kelompok.

a. *Degree Centrality*

Dalam grafik biner yang tidak diarahkan, sentralitas derajat aktor mengukur sejauh mana sebuah node terhubung ke semua node lain dalam jejaring sosial

b. *Closeness Centrality*

Sentralitas kedekatan aktor adalah pengembangan untuk merefleksikan seberapa dekat suatu simpul ke simpul-simpul lain dalam jejaring sosial

c. *Betweenness Centrality*

Konsep *betweenness centrality* menyangkut bagaimana aktor lain mengontrol atau memediasi hubungan antara pasangan yang tidak terhubung secara langsung

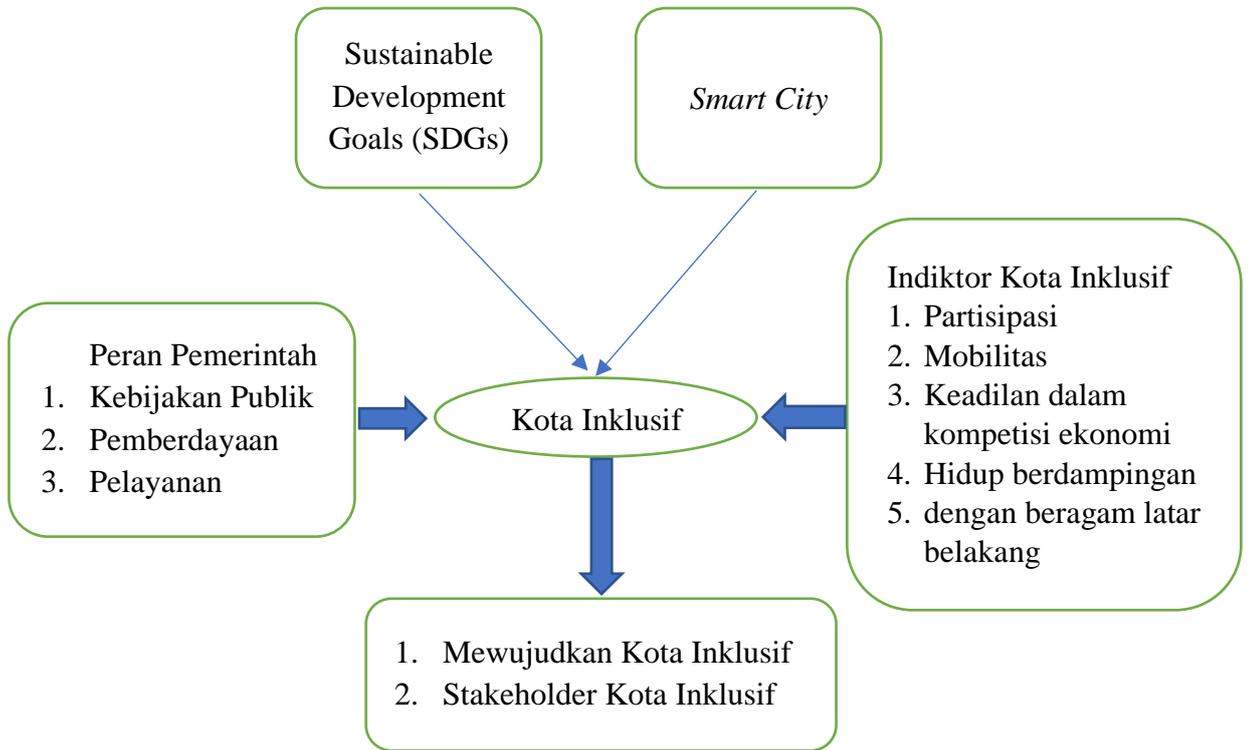
d. *Eigenvector Centrality*

Eigenvector Centrality berguna dalam menentukan siapa yang terhubung dengan nodes yang paling terhubung (Cheliotis, 2010).

3. Memulai *Social Network Analysis* (SNA)

Menggunakan SNA membutuhkan program NodeXL untuk mengukur hubungan antara faktor-faktor atau aktor yang terkait. Penggunaan NodeXL meluas hingga analisis jaringan dan alat visualisasi dengan memasukkan perpustakaan metrik jaringan dasar (misalnya derajat, tindakan sentralitas dan *clustering* dasar) dan grafik fitur visualisasi. Data dapat dimasukan atau diimpor ke *template* NodeXL dan cepat ditampilkan sebagai grafik. Hal ini menjawab kebutuhan para peneliti dan masyarakat pada umumnya untuk menganalisis dan memvisualisasikan (Smith, et.all, 2009).

2.3 Kerangka Berpikir



Bagan 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian

1.4 Definisi Konsepsional

Mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta yang merupakan Kota Budaya dan Kota Pelajar membutuhkan beberapa pemikiran seperti:

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan Kota Inklusif. Pemerintah sebagai penggerak pelaksanaan Kota Inklusif yang coba untuk diwujudkan agar setiap lapisan masyarakat memiliki hak yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

2. Partisipasi

Partisipasi dibutuhkan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Dibutuhkan lembaga partisipasi ataupun tokoh masyarakat untuk mengerakkan masyarakat, karena masyarakat perlu dorongan untuk turut serta berpartisipasi, kebanyakan masyarakat merasa enggan ketika harus berpartisipasi tanpa ada yang memulainya terlebih dahulu dan atau memimpin didepannya.

3. Mobilitas

Teknologi terus berkembang dan masyarakat juga harus mempelajari teknologi tersebut untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sejauh mana masyarakat bisa mempergunakan teknologi untuk membuat kehidupan mereka mejadi lebih mudah.

4. Keadilan dalam kompetisi ekonomi

Perekonomian menjadi hal yang sensitif untuk sebagian orang, tetapi masyarakat tetap harus bisa berlaku secara adil. Setiap pelaku ekonomi

memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki daya tarik sendiri untuk mendatangkan orang dan memilih mereka dalam melakukan transaksi jual beli

5. Hidup berdampingan dengan beragam latar belakang

Masyarakat tidak hanya hidup sendiri, tetapi juga hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya yang berbeda suku, agama, dan ras. Masyarakat harus menyesuaikan diri untuk bisa hidup bersama-sama dan membantu menyelesaikan permasalahan.

1.5 Definisi Operasional

Dalam memudahkan dalam menganalisis data yang akan diteliti maka diperlukan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian.

Tabel 2.3
Dimensi, Indikator, dan Parameter Kota Inklusif

No.	Dimensi	Indikator	Parameter
1	Peran	Menjalankan dan melaksanakan kebijakan	Terwujudnya Kota Inklusif untuk semua
2	Pemerintah	Partisipasi	Keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan yang dibuat pemerintah
3	Sosial	Mobilitas	Penggunaan teknologi oleh warga
4	Ekonomi	Perekonomian untuk semua secara adil	Kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berperan meningkatkan perekonomian
5	Lingkungan	Hidup berdampingan dengan beragam latar belakang	Dapat menerima keberagaman individu